

BIA YA UN TUK M ENCIPTAKAN PEN G ANGGURAN



Oleh: **Ign. Soni Kurniawan, S.E., M.Sc.**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang menentukan keberhasilan bangsa. Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah seharusnya menjadi negara kaya bukan menjadi negara miskin. Kaya atau miskin suatu bangsa dipengaruhi kemampuan SDM di negara tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Sebuah negara yang memiliki sumber daya alam sedikit namun memiliki SDM yang berkualitas akan menjadi negara maju, sebaliknya suatu negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan SDM yang tidak berkualitas akan menjadi negara terbelakang. Sumber daya alam bersifat pasif, manusialah yang aktif mengelola sumber daya alam untuk kemajuannya.

Indonesia termasuk negara yang kaya sumber daya alam, namun mengalami masalah pengangguran, kemiskinan, dan lebarnya distribusi pendapatan antara kaya dengan miskin. Rendahnya kualitas SDM merupakan alasan yang dapat diterima sebagai penyebab masalah tersebut. Oleh karenanya solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut adalah dengan peningkatan kualitas SDM. Rakyat di negara kita percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama memperbaiki bangsa ini, pendidikan harus bertambah dan berkualitas. Kita telah menaruh harapan pada pendidikan formal.

Namun setelah cukup waktu menaruh harapan, keadaan belum menggembirakan. Pengangguran, kemiskinan, dan jurang antara kaya dan miskin semakin bertambah. Pada awalnya di dalam kelompok pengangguran ditemukan orang berciri-ciri tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, namun sekarang di dalam kelompok pengangguran juga ditemukan orang berpendidikan tinggi. Identifikasi kelompok pengangguran menunjukkan pada tiap tingkatan lulusan sekolah, dari sekolah dasar sampai universitas ditemukan pengangguran. Sudah menjadi umum di lingkungan kita ditemukan lulusan strata satu menganggur dalam jangka waktu lama atau bahkan permanen. Kecenderungan ini juga bertambah memburuk dengan mulai ditemukannya lulusan strata dua yang menganggur dalam jangka waktu lama sebelum mendapat kerja. Sistem pendidikan justru berkontribusi menyumbang pengangguran terdidik. Kita sadar pola hidup dan karakter SDM kita yang belum maju menjadi alasan negara kita belum menjadi negara maju, dan

sayangnya pola dan karakter tersebut tercermin dalam cara kita membangun, termasuk pembangunan pendidikannya.

Pemerintah mengalokasikan banyak dana untuk memperluas pendidikan, demikian juga si terdidik harus membayar biaya pendidikan. Pendidikan membutuhkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang semakin besar seiring tingginya tingkatan sekolah. Biaya langsung misalnya gaji tenaga pendidik, pembangunan gedung, uang buku, pakaian, dan ongkos lainnya. Biaya tidak langsung berupa biaya kesempatan yang hilang atau *opportunity cost*, misalnya hilangnya kesempatan pada usia produktif siswa menghasilkan uang dengan bekerja karena waktunya untuk sekolah. Biaya langsung kuliah satu mahasiswa strata satu sampai lulus dapat menggantikan biaya sepuluh anak SD untuk sekolah sampai lulus. Biaya kuliah satu mahasiswa strata tiga sampai lulus dapat menggantikan biaya lima puluh anak SD sampai lulus SD atau bahkan lebih. Seorang yang miskin akan menerima biaya tidak langsung yang lebih besar dari pada seorang yang kaya ketika kuliah. Seorang anak miskin diperlukan tenaganya untuk membantu keluarganya memperoleh penghasilan namun diwaktu yang sama ia harus berada di bangku sekolah. Seorang anak kaya akan memiliki waktu yang cukup untuk berkonsentrasi pada sekolahnya tanpa keharusan membantu orang tua mencari tambahan pendapatan. Hal ini menjelaskan mengapa anak dari keluarga miskin yang disekolahkan gratis masih mengalami putus sekolah.

Semakin tinggi tingkatan sekolah semakin besar subsidi pendidikan dari pemerintah, namun semakin kecil jumlah terdidik yang disubsidi. Diantara jumlah kecil yang disubsidi di bangku kuliah, hanya sedikit orang miskin yang mendapatkannya, karena semakin sedikit kemungkinan bagi orang miskin untuk dapat menempuh pendidikan tinggi. Jadi semakin miskin seseorang semakin sedikit subsidi yang ia dapatkan. Seorang miskin yang lulus SLTP, akan mempertimbangkan berulang kali kemungkinan untuk melanjutkan ke SLTA apalagi ke bangku kuliah, karena kondisi ekonominya. Oleh karenanya orang miskin tersebut secara otomatis kehilangan kesempatan untuk mendapatkan subsidi pendidikan di tingkat SLTA dan perguruan tinggi. Kemungkinan orang miskin tersebut untuk memperoleh kesempatan memperbaiki tingkat pendapatan ketika lulus juga menjadi semakin kecil, dan kesempatan orang kaya untuk memperbaiki tingkat pendapatan semakin besar. Maka jurang pendapatan antara kaya dan si miskin tetap akan lebar.

Sebenarnya dari mana asal biaya subsidi pendidikan yang diberikan pemerintah? Sumber dana pendidikan berasal APBN dan APBD yang antara lain dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan warga negara. Karena orang miskin juga membayar pajak maka orang miskin juga berkontribusi dalam memberikan subsidi pendidikan. Namun karena seorang miskin akan sulit mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, maka subsidi pendidikan pada tingkatan sekolah yang

tinggi sebagian besar dinikmati oleh orang kaya. Sehingga disini terjadi orang miskin membantu biaya pendidikan orang kaya.

Pencegahan ironi seperti diatas perlu dilakukan. Pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar sangat membantu mencegah orang miskin tidak sekolah, atau meminimalkan putus sekolah. Kemudian bantuan juga harus diteruskan pada tingkat perguruan tinggi. Pada pendidikan tinggi, subsidi harus diberikan kepada orang yang tepat. Subsidi bagi mahasiswa, tidak diberikan kepada yang cerdas, namun kepada yang cerdas dan miskin. Menjamin keberadaan sejumlah mahasiswa miskin berada di perguruan tinggi harus dilakukan. Sistem kuota dapat dilakukan, melalui penentuan prosentase sejumlah mahasiswa harus berasal dari keluarga miskin.

Sebuah anggaran belanja pemerintah memiliki sifat *opportunity cost*, artinya ketika anggaran dialokasikan untuk A, maka anggaran tersebut akan habis dan tidak bisa dialokasikan untuk B. Sebagai contoh pemerintah mengeluarkan moratorium penghentian sementara perekrutan pegawai negeri karena proporsi pembayaran gaji pegawai negeri telah mencapai 50% dari total anggaran belanja. Artinya bahwa rakyat hanya punya sisa sebesar 50% untuk mendapat pembangunan lainnya. Demikian juga dana APBN dan APBD untuk pendidikan memiliki sifat *opportuniy cost*. Semakin besar alokasi dana untuk pendidikan, semakin kecil dana yang tersedia untuk penciptaan usaha yang menyerap lulusan sekolah. Alokasi dana pendidikan yang besar tanpa diimbangi alokasi dana yang bertujuan menyerap tenaga kerja lulusan sekolah akan menghasilkan pengangguran terdidik.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penganggur, semakin besar kerugian pemerintah akibat menanggung biaya sekolahnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang penganggur semakin besar kerugian sosial yang ditanggung masyarakat akibat pajak yang mereka bayarkan tidak menghasilkan manfaat bagi mereka. Hal ini menunjukkan mahalnya menciptakan pengangguran terdidik. Oleh karena itu proporsi pembagian alokasi dana pembangunan dari APBN dan APBD harus tepat. Terlalu banyak untuk belanja pegawai tidak dapat dibenarkan. Agar dapat mengurangi pengangguran, anggaran penciptaan lapangan kerja harus tumbuh lebih cepat dibanding anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan yang lebih besar daripada anggaran untuk menyerap tenaga kerja lulusan sekolah akan menciptakan *bottle neck* atau hambatan bagi lulusan untuk masuk dunia kerja.

Terlalu sederhana bila mengatakan pengelolaan biaya dan anggaran pendidikan sebagai satu-satunya penyebab masalah pengangguran, kemiskinan, serta jurang kaya dan miskin. Analisa biaya dan anggaran pendidikan yang bersifat kuantitatif merupakan hal penting namun tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, serta jurang pendapatan antara kaya dan miskin. Analisa kualitas sistem pendidikan dan kurikulumnya merupakan hal yang sama pentingnya. Betapa sia-sianya dana yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan dan tahun-tahun hidup

yang dihabiskannya di bangku sekolah hanya untuk menerima pendidikan tidak berkualitas. Semangat *kaizen* atau perbaikan terus menerus dalam kualitas pendidikan perlu dilakukan. Karena hanya dengan kualitas yang sudah *mendarah daging*, sistem pendidikan dapat menghasilkan lulusan berkualitas secara konsisten.

Catatan:

Penulis adalah Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.